



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA**

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRIWULAN I TAHUN 2025

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA**

Website :

pta-surabaya.go.id



LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TRIWULAN I TAHUN 2025
(Periode Survei bulan Januari - Maret)

berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

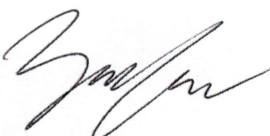
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
pada hari Selasa, 01 April 2025


Top Management,

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survei,


Benny Hardiyanto, S.H.

Ketua Tim Survei,


H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama pada Triwulan I Tahun 2025 (periode survei bulan Januari – Maret) dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 sekaligus menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 4 April 2023 Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi. Kepuasan penerima layanan dalam hal tingkat persepsi korupsi dapat dijelaskan/ diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Demikian laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Surabaya, 01 April 2025

Ketua Tim Survei,



H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Guna mengukur tingkat persepsi korupsi dalam pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2025 (Periode Survei bulan Januari – Maret). Pelaksanaan survei ini merupakan wujud kepatuhan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Laporan survei ini memuat hasil evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap 77 responden yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi 5 (lima) indikator, antara lain:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,94;
- b. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95;
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
- e. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dalam persepsi korupsi Triwulan I Tahun 2025, didapati nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,95 atau nilai interval konversi sebesar 98,80 yang tergolong dalam kategori mutu pelayanan A (bersih dari korupsi). Melalui hasil survei ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I KUESIONER SURVEI	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	5
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	9
A. Analisis Hasil Survei	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	18
BAB IV DATA SURVEI	21
A. Data Responden	21
B. Data dukung Lainnya	32
BAB V PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie	6
Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi.....	8
Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	9
Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	11
Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur	12
Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku.....	14
Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar.....	15
Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara.....	16
Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2025.....	17
Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	18
Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	22
Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	27
Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	10
Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	11
Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	12
Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/.....	14
Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	15
Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	17
Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	27
Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	31

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag.....	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag.....	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	32

BAB I KUESIONER SURVEI**A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu bentuk komitmennya berupa pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024 (Periode Survei bulan Oktober – Desember) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berupaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya untuk dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, serta telah terbebas dari praktik korupsi, yang diantaranya dapat dilihat dari potensi pelaksanaan suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

B. Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan perundangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan dan layanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Menilai efektifnya program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
5. Membantu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengevaluasi dan menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas

institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini, antara lain:

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersih, akuntabel, dan transparan;
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai yang diharapkan oleh pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta anti gratifikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

F. Manfaat

Dengan tersedianya data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat:

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur/ indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; dan
4. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Unsur/ Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang memuat 5 (lima) unsur/ indikator, antara lain mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.

H. Kuesioner Survei

Kuesioner survei yang disusun untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sebagai berikut:

1. Bagian I: Identitas Responden, meliputi

- a. Nama responden;
- b. Nomor ponsel responden;
- c. Jenis kelamin;
- d. Usia;
- e. Pekerjaan;
- f. Pendidikan; dan
- g. Jenis layanan

2. Bagian II: Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan survei ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner *online* melalui *link* <https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2025> terdiri dari 5 (lima) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan (nilai 1 – 6) yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Diberi nilai 1 (tidak sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- b. Diberi nilai 2 (tidak jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- c. Diberi nilai 3 (kurang jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan ada namun belum jelas arah alurnya sehingga prosesnya tidak efektif;
- d. Diberi nilai 4 (kurang efektif), jika pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum memuaskan sehingga prosesnya belum efektif;
- e. Diberi nilai 5 (sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit namun masih perlu diefektifkan; dan
- f. Diberi nilai 6 (sangat sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat memuaskan, sangat sederhana sehingga prosesnya mudah dan efektif.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi kriteria survei, yaitu satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan masyarakat/ *stakeholder* yang mendapatkan manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan jenis layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:

1. Layanan pembinaan dan pengawasan;
2. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.

Kriteria responden yang diambil mencakup variasi yang cukup dari karakteristik masyarakat, seperti jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan guna memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili seluruh pengguna dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel pada pengukuran ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang meliputi aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan, permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan/ perantara.

Deskripsi kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei ini menggunakan tabel Morgen dan Krejcie sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krejcie

Tabel Morgan & Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

Sementara teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Dengan demikian, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dihitung melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses melalui alamat [link https://survei.badilag.net/](https://survei.badilag.net/) dengan menggunakan "nilai rata-rata" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana rumus berikut:

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{\text{Jumlah responden} \times 30} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{4} \times 100\%$$

2. Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala Likert dengan penilaian antara 1 – 6, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi terendah (tidak sesuai), sementara nilai 6 merupakan skor persepsi tertinggi (sangat sesuai) dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani (semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan).

Metode analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas pertanyaan survei.

Adapun nilai interval persepsi kualitas pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

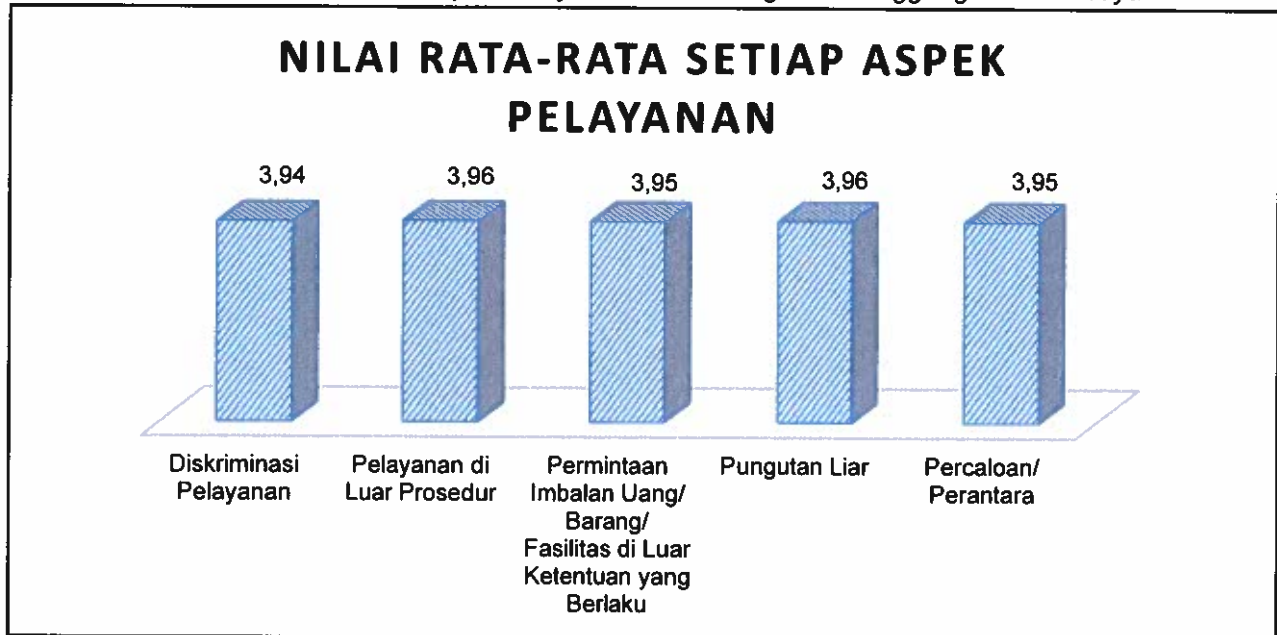
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 77 responden. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,95 dengan nilai konversi sebesar 98,80 dan berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variabel penilaian. Adapun nilai rata-rata setiap aspek pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,94	Bersih dari Korupsi (A)	5
U2	Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,96	Bersih dari Korupsi (A)	1
U3	Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3,95	Bersih dari Korupsi (A)	3
U4	Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,96	Bersih dari Korupsi (A)	2
U5	Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,95	Bersih dari Korupsi (A)	4
	Rata-rata Tertimbang	3,95	Sangat Baik (A)	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur pelayanan, terdapat unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan sangat baik, yaitu (1) pelayanan di luar prosedur dan (2) pungutan liar. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan paling rendah, yaitu diskriminasi pelayanan. Di bawah ini merupakan analisis data hasil masing-masing aspek pelayanan dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

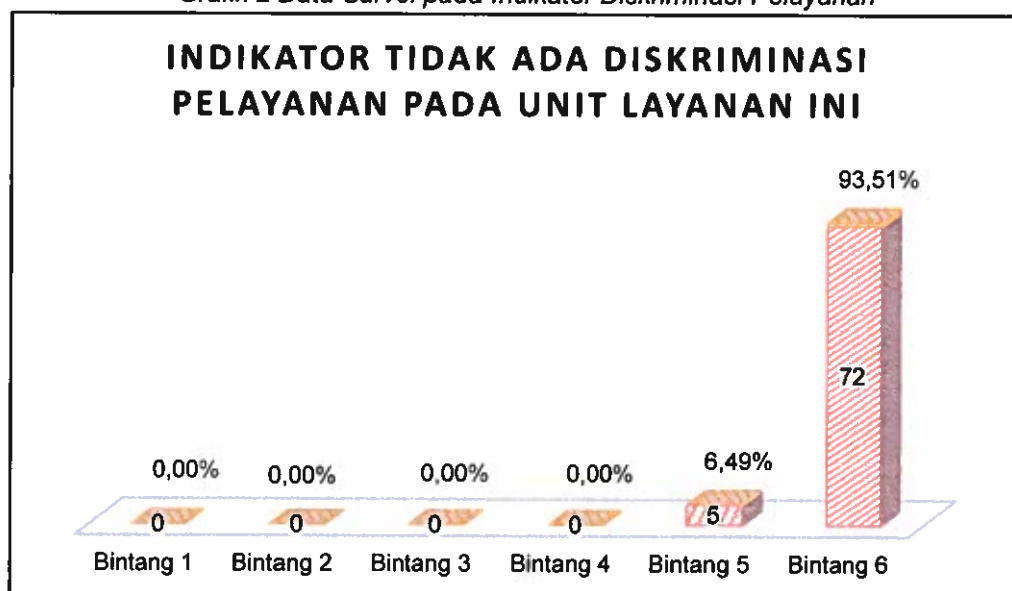
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	4	5,19%
★ ★ ★ ★ ★ ★	73	94,81%
Jumlah	77	100,00%
Indeks		3,94

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,94. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 72 responden (93,51%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa petugas layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Selain itu, sejumlah 5 responden (6,49%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/ prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan menunjukkan hasil pada indeks 3,96. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

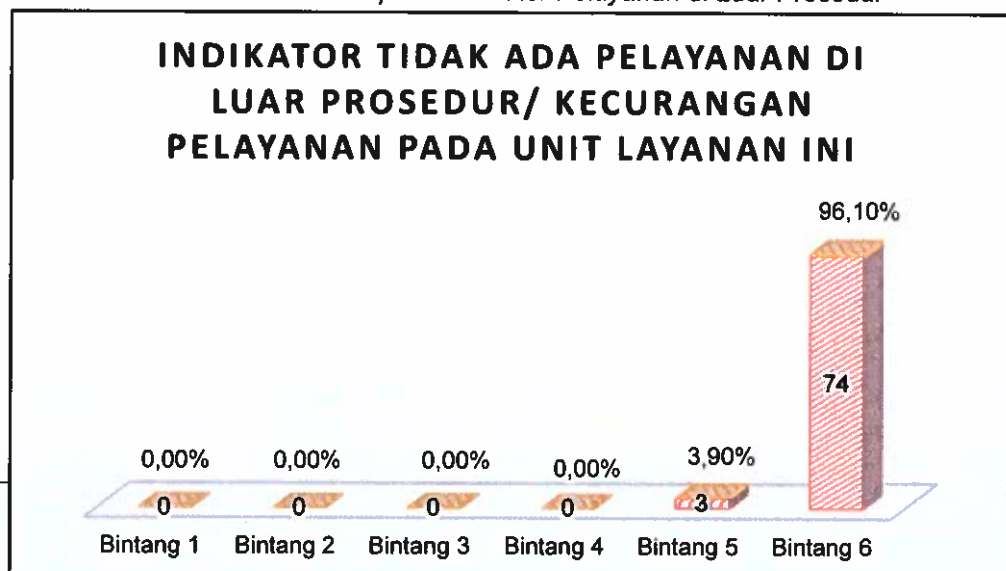
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	3	3,90%
★ ★ ★ ★ ★ ★	74	96,10%
Jumlah		100,00%
Indeks		3,96

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,96. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 74 responden (96,10%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sejumlah 3 responden (3,90%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak adanya kecurangan pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/ jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll) di luar ketentuan. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori "Bersih dari Korupsi".

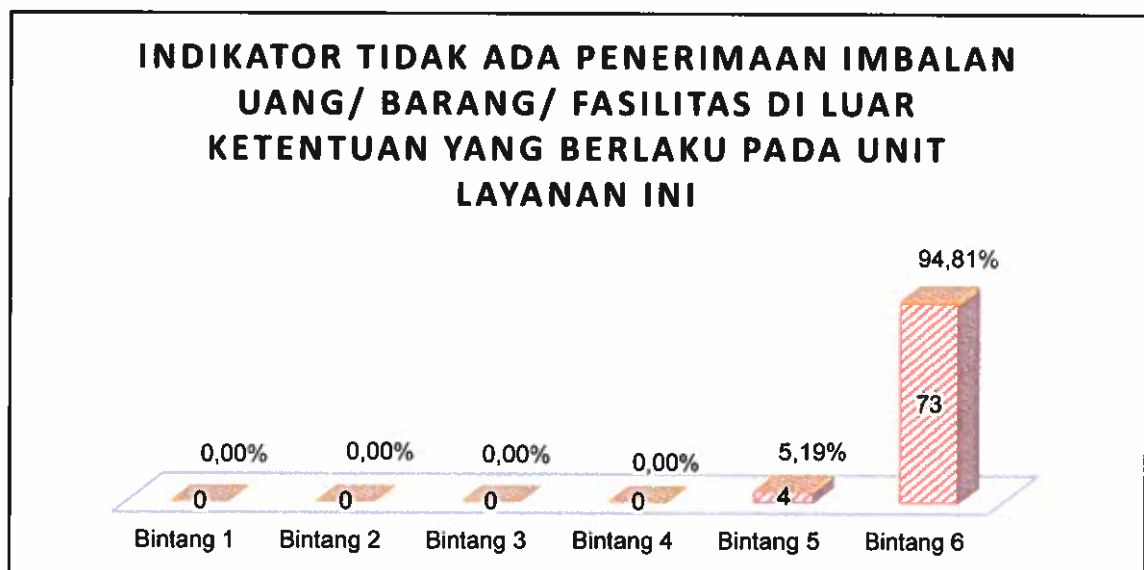
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	4	5,19%
★ ★ ★ ★ ★ ★	73	94,81%
Jumlah		100,00%
Indeks		3,95

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini berada pada angka 3,95. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 73 responden (94,81%) memberikan skor bintang 6 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 4 responden (5,19%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak ada

imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih perlu ditingkat lagi.

4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli) bisa dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,96. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori "Bersih dari Korupsi".

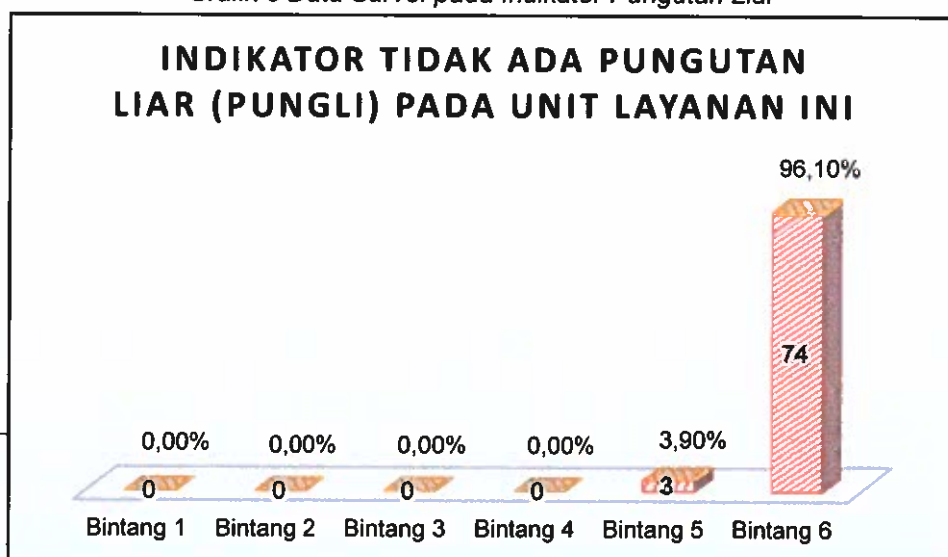
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	3	3,90%
★ ★ ★ ★ ★ ★	74	96,10%
Jumlah		100,00%
Indeks		3,96

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,96. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 74 responden (96,10%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 3 responden (3,90%) memberikan skor bintang 5 yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden belum sepenuhnya setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Informasi ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan yang dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

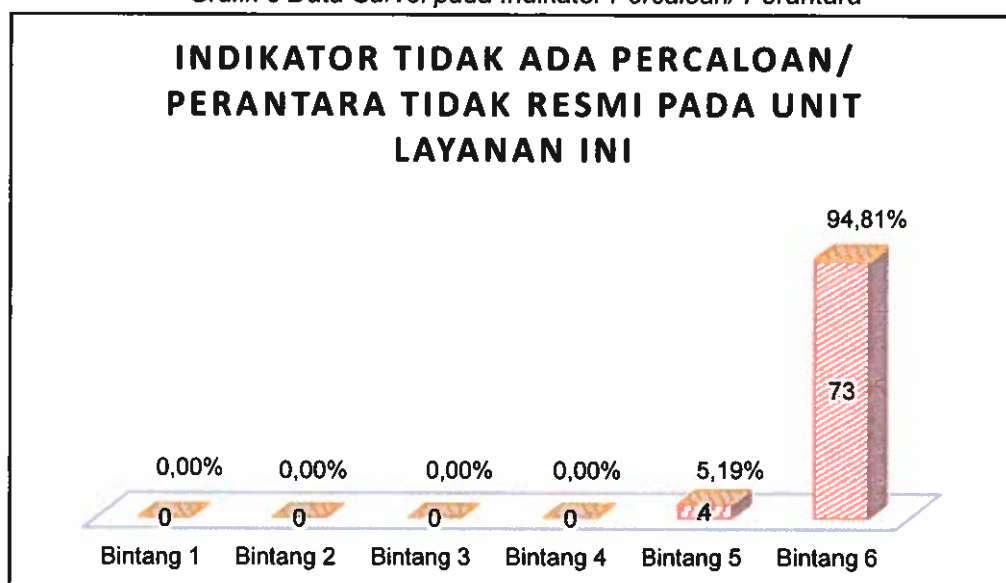
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tarif/ biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/ biaya yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	1	1,16%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	4	5,19%
★ ★ ★ ★ ★ ★	73	94,81%
Jumlah		100,00%
Indeks		3,95

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,95. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 73 responden (94,81%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu, sejumlah 4 responden (5,19%) memberikan skor bintang 5 yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2025 (periode survei bulan Januari – Maret) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2025

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai SPAK	3,95 dengan nilai konversi 98,80
2	Kategori	Bersih dari Korupsi
3	Unsur Terendah	U1: Diskriminasi Pelayanan
4	Unsur Tertinggi	U2: Pelayanan di Luar Prosedur U4: Pungutan Liar
5	Prioritas Perbaikan	U1: Diskriminasi Pelayanan U5: Percaloan/ Perantara

Guna memotivasi dan memperbaiki kinerja pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka masukan/ opini/ pandangan masyarakat/ *stakeholder* sangat diperlukan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat/ *stakeholder*. Masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1	Semoga PTA surabaya tetap dapat memberikan pelayanan terbaiknya dalam melayani masyarakat
2	Teruslah berinovasi dalam pelayanan sebagai ciri dari peradilan yang berkelas <i>modern</i>
3	Pelayanan yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan
4	Pelayanan sudah baik, responsif, transparan, dan akuntabel agar dipertahankan
5	Semoga terus konsisten ke depannya dalam memberikan pelayanan
6	Pelayanan PTA Surabaya sudah sangat profesional, prima, cepat, dan memuaskan, semoga terus dipertahankan dan selalu ditingkatkan dengan inovasi terbaru, PTA Surabaya jaya kompak unggul!
7	Perlu dipertahankan yang sudah baik dan ditingkatkan lebih baik lagi
8	Pelayanan yang sudah baik mohon dipertahankan
9	Pelayanan prima integritas terjaga
10	Pertahankan dan tingkatkan kualitas layanan yang telah ada

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2025 (periode survei bulan Januari – Maret) didapatkan hasil survei sebesar 98,80 dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,95 yang termasuk dalam kategori **"BERSIH DARI KORUPSI"**. Dari 5 (lima) unsur/ indikator, terdapat nilai unsur tertinggi, yaitu pada unsur pelayanan di luar prosedur dan pungutan liar dengan nilai 3,96 sementara unsur diskriminasi pelayanan memperoleh nilai unsur terendah, yaitu sebesar 3,94.

Meskipun sebagian besar responden memberikan skor dan rata-rata yang tinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), namun terdapat beberapa catatan analisis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan layanan agar pelayanan di

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin optimal dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat terus meningkat.

Tindak lanjut tersebut juga diperlukan guna mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang salah satu arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), antara lain:

1. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kemampuan bagi petugas PTSP sebagai pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan akuntabel berdasarkan SOP; dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap layanan yang diberikan dilakukan secara profesional dan tidak ada diskriminasi atau kecurangan.

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu		PIC
			April	Mei	
1	U1: Diskriminasi Pelayanan	<p>a. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan bagi petugas PTSP sebagai pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan akuntabel berdasarkan SOP; dan</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap layanan yang diberikan dilakukan secara profesional dan tidak ada diskriminasi atau kecurangan.</p>	√	√	Top Management

Setelah melakukan tindak lanjut, pihak unit layanan harus memantau dan mengevaluasi kembali kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil survei harus melibatkan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Responden ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2025 (periode survei bulan Januari – Maret) diikuti oleh 77 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun data dari para responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan I Tahun 2025 (periode survei bulan Januari – Maret), sebagai berikut:

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag

The screenshot shows a web browser window with the URL 'survei.badilag.net/home/respone'. The application header is blue with the 'SURVELAG' logo and navigation links for 'Dashboard' and 'Survei'. Below the header, there's a section titled 'Survei' with a subtitle 'Badilag (Survei)'. A navigation bar contains four items: 'Survei', 'Data Responden' (which is highlighted), 'Formulir Responden', and 'Kirim & Kirim'. The main content area is titled 'Identitas Responden' with a subtitle 'Kamu mengisi identitas data pribadi anda'. The form includes the following fields and options:

- Nama Responden:** A text input field with a placeholder 'NIK (Nomor Identitas)'.
- Email:** A text input field.
- Pekerjaan:** A dropdown menu with 'Pilih pekerjaan' as the selected option.
- Jenis Kelamin:** A dropdown menu with 'Pilih jenis kelamin' as the selected option.
- Agama:** A dropdown menu with 'Pilih agama' as the selected option.
- Pendidikan:** A dropdown menu with 'Pilih pendidikan' as the selected option.
- Usia:** A dropdown menu with 'Pilih usia' as the selected option.
- Consent:** A checkbox labeled 'Bahwa saya mengisi data ini dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun'.
- Buttons:** A blue 'Kembali' button and a green 'Selanjutnya >' button.

Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
1	Samina Laela, S.E., S.H., M.H.	08*****7840	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
2	Moch. Ansori, S.Kom.	08*****7778	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
3	Jani, S.H.	08*****4512	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
4	Mohammad Ainur Rofiq, S.H.	08*****3634	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
5	Fuad, S.H.I., M.H.	08*****2006	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
6	Aisyah, S.Kom., M.H.	08*****6119	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
7	Moch. Ali, S.H., M.H.	08*****7910	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
8	Syaiful Anwar, S.Ag., M.HP.	08*****9922	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
9	Ila Pujiastuti, S.H.I.	08*****2992	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
10	Ery Handini, S.H., M.H.	08*****4682	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
11	Nasaritha Randhitia Permata, S.H., M.H.	08*****8501	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
12	Achmad Fendi Suprasetyo, S.Si.	08*****4008	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
13	Nanda Shultaanan Nashiraa	08*****0300	SMA/ SMK Sederajat	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
14	Helmi Muhammad Faqih, S.Kom.	08*****5662	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan pembinaan dan pengawasan
15	Irawan Mahardika, S.Kom., M.H.	08*****9680	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
16	Murtadha Muthahhari, S.H.	08*****5867	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
17	Adang Junaedi	08*****1144	Akademi/ Diploma	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan pembinaan dan pengawasan
18	Yazid Alfian Huda, S.Pd.	08*****0295	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
19	Ivana Rantansari, S.A.P.	08*****9196	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
20	Irawati Tirta Handayani, S.E.	08*****8022	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
21	Nandayu	08*****1001	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
22	Silvi Ritmadhanti Ziyanna	08*****0187	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
23	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	08*****6771	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
24	Khiftiyah, S.Sos.	08*****7800	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
25	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	08*****1975	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
26	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	08*****1975	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
27	Drs. Syaifullah, S.H., M.H.	08*****3132	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
28	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	08*****1975	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
29	Rahajeng Dwi Permatasari, S.Kom.	08*****9722	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
30	Muhamad Choirudin, S.H.I.	08*****8808	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Lainnya	Layanan pembinaan dan pengawasan
31	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	08*****1975	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
32	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.	08*****8329	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
33	Junaidi Syampurno, S.H.	08*****2247	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
34	Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H.	08*****8743	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
35	Ratna Bumulo, S.Ag.	08*****1499	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
36	Anendya Dewi Ratih, S.Kom.	08*****8585	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
37	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.	08*****9198	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
38	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.	08*****4009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
39	Tedy Agastya Dwi Permana, S.Kom.	08*****3213	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
40	M. Ali Mahfud, S.H.I.	08*****7924	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
41	Ridho Firmansyah, S.H., M.H.	08*****0028	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
42	Buyung Tumanggor	08*****9833	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
43	Rofii, S.H., M.H.	08*****4462	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
44	Rachmad Firman Kristanto, S.Mn.	08*****1937	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
45	Oktavian Aidar Y. P.	08*****1643	Akademi/ Diploma	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
46	Arum Zaria Putri	08*****8187	SMA/ SMK Sederajat	Perempuan	Belum/ tidak bekerja	Layanan pembinaan dan pengawasan
47	Naning Erna Susanti, S.H., M.H.	08*****8089	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pengacara	Layanan penyelesaian perkara
48	Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I.	08*****2889	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pengacara	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
49	Dodi Indra Kusuma, S.H.	08*****4754	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pengacara	Layanan penyelesaian perkara
50	Tony Setiawan S.H	08*****5596	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pengacara	Layanan penyelesaian perkara
51	Jawahiruddaulah Asfaq, S.H.I.	08*****4324	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pengacara	Layanan penyelesaian perkara
52	Mahrus	08*****5458	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan pembinaan dan pengawasan
53	Mashudi, S.Ag., M.H.	08*****8433	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
54	Mun Farida, S.H., M.H.	08*****0265	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
55	Nur Laela Kusna, S.Ag., M.H.	08*****2055	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
56	Sihabudin, S.H.I.	0*****2843	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
57	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	08*****4855	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
58	St. Mar'atu Ulfah, S.Ag.	08*****7555	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
59	H. Mahrus, Lc., M.H.	08*****5458	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
60	R. Brudin Adi Kusuma, S.E.	08*****2707	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
61	Fatmawati	08*****4770	Strata-2 (S2)	Perempuan	Lainnya	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
62	Puspita Nur Astuti, S.E., M.H.	08*****2690	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
63	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	08*****3330	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
64	Syaiful Arifin, S.H.	08*****4980	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
65	Siti Artaniyah, S.Ag.	08*****0149	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
66	Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H.	08*****3197	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
67	Aris Dwi Sutiyono, S.T.	08*****6268	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
68	Abdul Kodir, S.Ag., M.M.	08*****5331	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
69	Enggar Bagus Saputro, S.Kom.	08*****7933	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
70	Achmad Fathoni, S.H.I.	08*****1183	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
71	Mashar, S.H.	08*****4225	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
72	Febry Emawan Dewata, S.H., M.H.	08*****0011	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
73	Imdad, S.H.I., M.H.	08*****1236	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
74	Indra	08*****1125	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Industri	Layanan penyelesaian perkara
75	Aryl Zabarrespati, S.E.	08*****2256	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
76	H. Santoso	08*****5663	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
77	Purnama Kurniawan, S.H.	08*****1234	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan

1. Jenis Layanan

Pada periode triwulan I ini, sebagian besar responden adalah responden yang menggunakan layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan sejumlah 34 orang (44,16%). Disusul dengan layanan pembinaan dan pengawasan sejumlah 22 orang (28,57%), layanan penyelesaian perkara sejumlah 16 orang (20,78%), dan layanan penyerahan produk pengadilan sejumlah 5 orang (6,49%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persentase
1	Layanan pembinaan dan pengawasan	22 orang	28,57%
2	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	34 orang	44,16%
3	Layanan penyelesaian perkara	16 orang	20,78%
4	Layanan penyerahan produk pengadilan	5 orang	6,49%
Jumlah		77 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

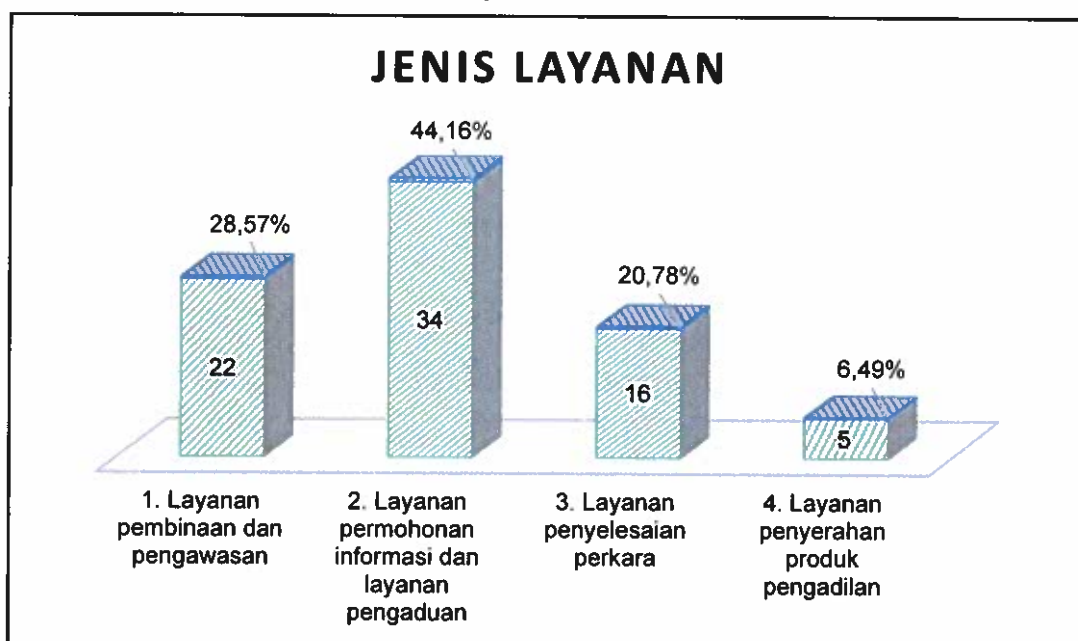
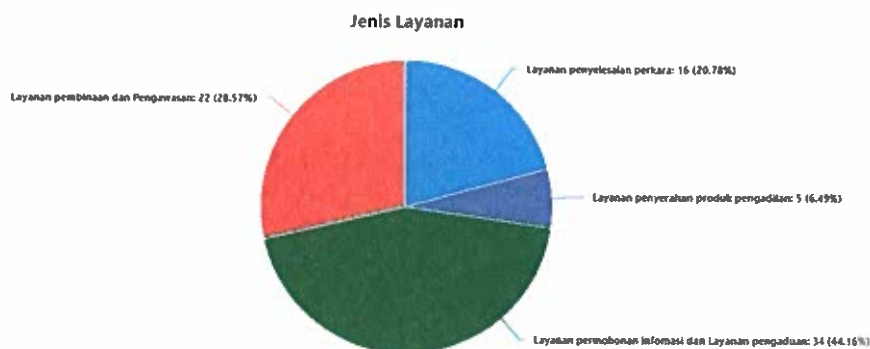


Diagram 1 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan



Jenis Layanan	Jumlah Responden
Layanan penyelesaian perkara	16
Layanan penyerahan produk pengadilan	5
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	34
Layanan pembinaan dan Pengawasan	22

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 55 orang (71,43%) dan sisanya perempuan sejumlah 22 orang (28,57%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	55 orang	71,43%
2	Perempuan	22 orang	28,57%
Jumlah		77 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

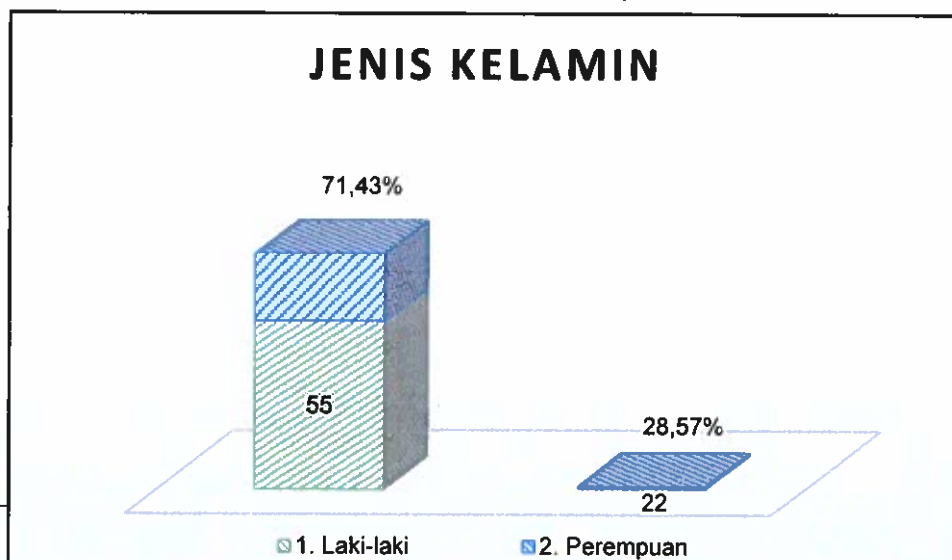
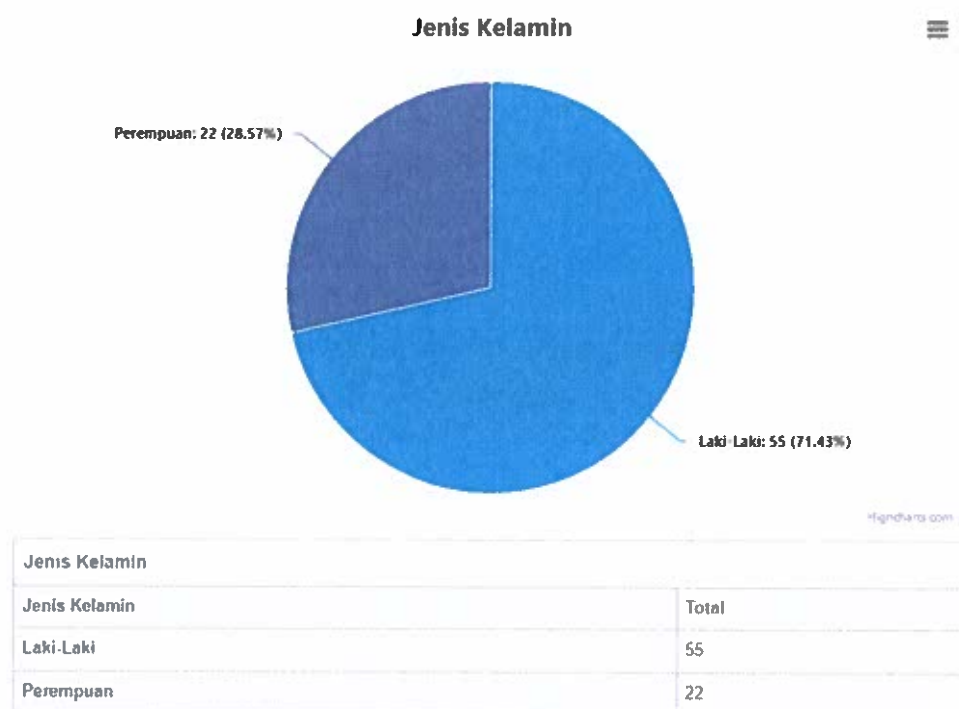


Diagram 2 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin



3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berpendidikan Strata-1 (S1), yaitu sejumlah 43 orang (70,00%). Disusul dengan responden Strata-2 (S2) sejumlah 29 orang (45,71%), Diploma (D1/ D2/ D3) sejumlah 2 orang (3,03%), dan SLTA/ SMA/ Sederajat sejumlah 2 orang (3,03%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Strata-3 (S3)	1 orang	1,30%
2	Strata-2 (S2)	29 orang	37,66%
3	Strata-1 (S1)	43 orang	55,84%
4	Diploma (D1/D2/D3)	2 orang	2,60%
5	SLTA/ SMA/ Sederajat	2 orang	2,60%
Jumlah		77 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

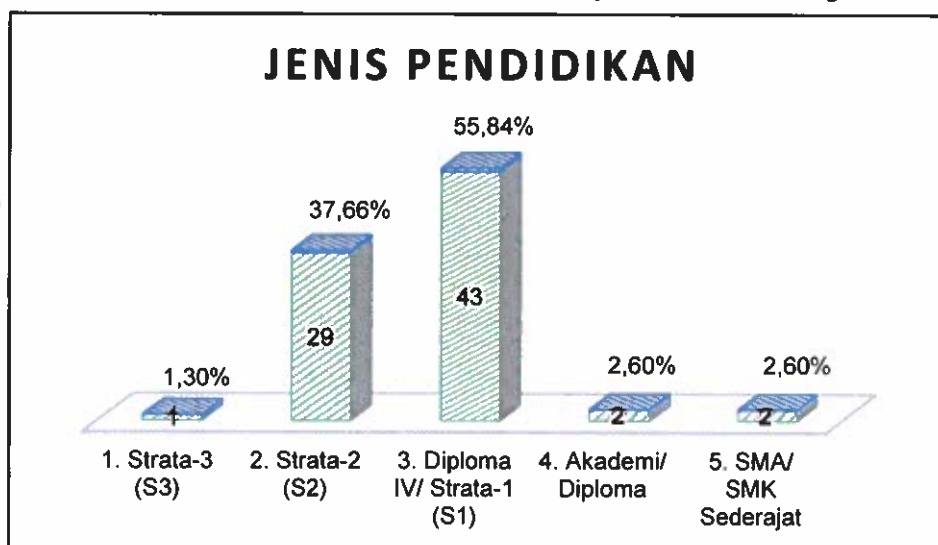
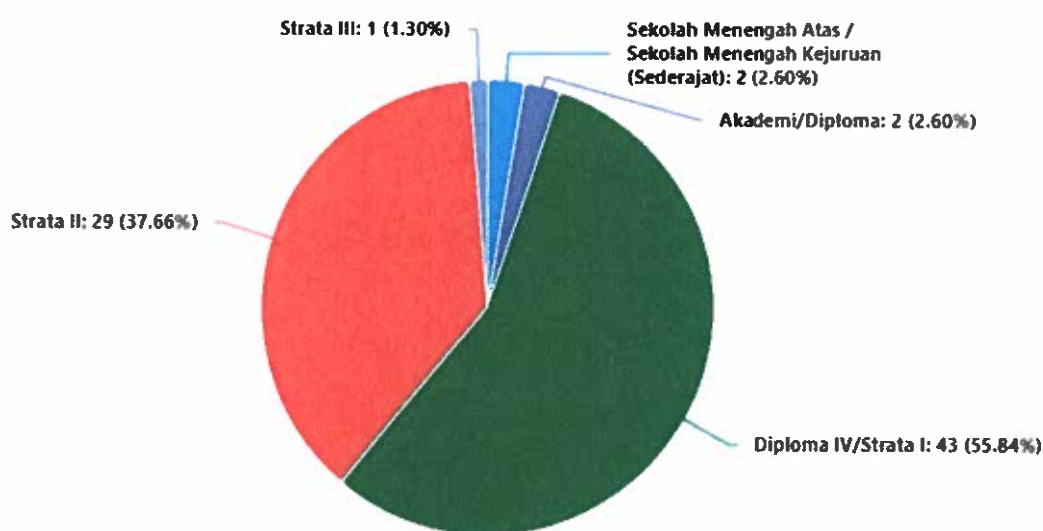


Diagram 3 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Highcharts.com

Tingkat Pendidikan	
Tingkat Pendidikan	Total
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	2
Akademi/Diploma	2
Diploma IV/Strata I	43
Strata II	29
Strata III	1

4. Pekerjaan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 63 orang (81,82%), pengacara sejumlah 5 orang (6,49%), karyawan honorer sejumlah 4 orang (5,19%). Disusul dengan responden yang berprofesi sebagai lainnya sejumlah 3 orang (3,90%). Selain itu, profesi industri dan belum/ tidak bekerja masing-masing sejumlah 1 orang (1,30%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	63 orang	81,82%
2	Karyawan honorer	4 orang	5,19%
3	Pengacara	5 orang	6,49%
4	Industri	1 orang	1,30%
5	Lainnya	3 orang	3,90%
6	Belum/ tidak bekerja	1 orang	1,30%
Jumlah		77 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

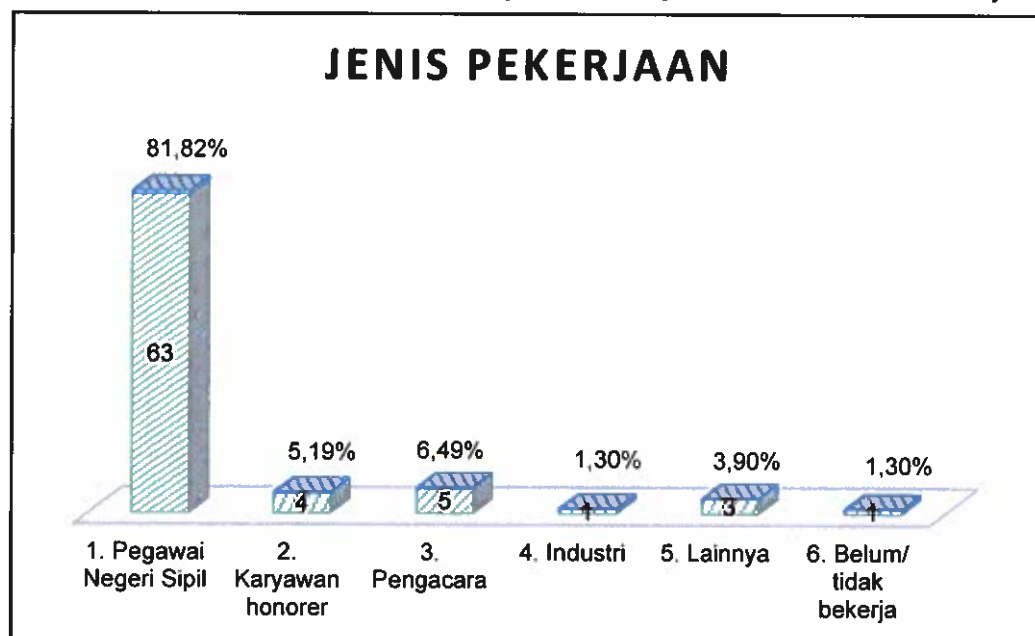
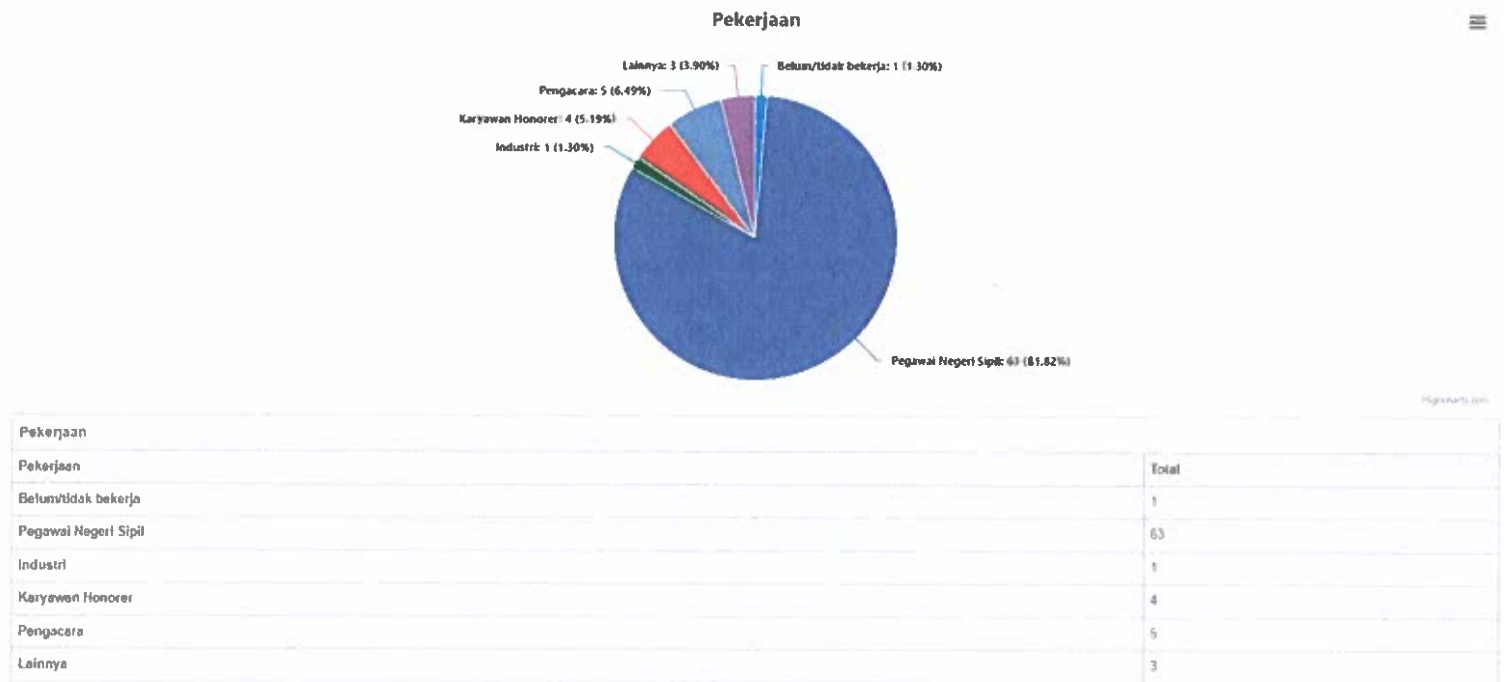


Diagram 4 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan



B. Data dukung Lainnya

Berikut ini dilampirkan data dukung lainnya berupa tangkapan layar pada aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

DATA UNSUR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode Triwulan I Tahun 2025
Total Responden : 77 INDEKS : 3.95

Copy CSV Excel Print

NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.94	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.96	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.95	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.96	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini	3.95	Sangat Baik (A)

STATISTIK SURVEI
Periode Triwulan I Tahun 2025

77
Data Responden

3.9
Indeks Kepuasan Masyarakat

3.92
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

3.95
Indeks Persepsi Anti Korupsi

**Data Detail Hasil Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
1	6	6	6	6	6	4
2	6	6	6	6	6	4
3	5	5	5	5	5	3
4	6	6	6	6	6	4
5	6	6	6	6	6	4
6	6	6	6	6	6	4
7	6	6	6	6	6	4
8	6	6	6	6	6	4
9	6	6	6	6	6	4
10	6	6	6	6	6	4
11	6	6	6	6	6	4
12	6	6	6	6	6	4
13	6	6	6	6	6	4
14	6	6	6	6	6	4
15	6	6	6	6	6	4
16	6	6	6	6	6	4
17	6	6	6	6	6	4
18	6	6	6	6	6	4
19	6	6	6	6	6	4
20	6	6	5	6	6	3,8
21	6	6	6	6	6	4
22	6	6	6	6	6	4
23	6	6	6	6	6	4
24	6	6	6	6	6	4
25	6	6	6	6	6	4
26	6	6	6	6	6	4
27	6	6	6	6	6	4
28	6	6	6	6	6	4
29	6	6	6	6	6	4
30	6	6	6	6	6	4
31	6	6	6	6	6	4
32	5	5	5	5	5	3
33	6	6	6	6	6	4
34	6	6	6	6	6	4
35	6	6	6	6	6	4
36	6	6	6	6	6	4
37	6	6	6	6	6	4
38	6	6	6	6	6	4
39	6	6	6	6	6	4
40	6	6	6	6	6	4
41	6	6	6	6	6	4
42	6	6	6	6	6	4
43	6	6	6	6	6	4
44	6	6	6	6	6	4
45	6	6	6	6	6	4
46	5	5	5	5	5	3
47	6	6	6	6	6	4
48	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
49	6	6	6	6	6	4
50	6	6	6	6	6	4
51	6	6	6	6	5	3,8
52	6	6	6	6	6	4
53	5	6	6	6	6	3,8
54	5	6	6	6	6	3,8
55	6	6	6	6	6	4
56	6	6	6	6	6	4
57	6	6	6	6	6	4
58	6	6	6	6	6	4
59	6	6	6	6	6	4
60	6	6	6	6	6	4
61	6	6	6	6	6	4
62	6	6	6	6	6	4
63	6	6	6	6	6	4
64	6	6	6	6	6	4
65	6	6	6	6	6	4
66	6	6	6	6	6	4
67	6	6	6	6	6	4
68	6	6	6	6	6	4
69	6	6	6	6	6	4
70	6	6	6	6	6	4
71	6	6	6	6	6	4
72	6	6	6	6	6	4
73	6	6	6	6	6	4
74	6	6	6	6	6	4
75	6	6	6	6	6	4
76	6	6	6	6	6	4
77	6	6	6	6	6	4
Total	457	459	458	459	458	-
Jumlah Kuesioner	77	77	77	77	77	-
Rata - rata	3,94	3,96	3,95	3,96	3,95	-
Rata-rata x Bobot	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	-
Nilai Rata-rata Tertimbang						3,95
IPAK Unit Pelayanan						98,80

Kesimpulan:

Nilai IPAK setelah dikonversi : 98,80

Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih Dari Korupsi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan 77 responden yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki indeks persepsi anti korupsi, yaitu 3,95 atau 98,80 dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut terdiri dari 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,94;
2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95;
4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2025 (periode survei bulan Januari – Maret) di atas menunjukkan bahwa mayoritas memiliki indeks di atas 3,95 atau masuk pada mutu "**BERSIH DARI KORUPSI**". Namun, dari 5 (lima) unsur/ indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan indeks terendah, yaitu indikator diskriminasi pelayanan. Terhadap indikator dengan nilai tertinggi agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara terhadap indikator dengan nilai terendah agar tetap dipantau dan lebih ditingkatkan lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
2. Surat Permohonan Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Nomor: 1568/KPTA.W13-A/PS1.7/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dalam rangka peningkatan pelayanan mutu dan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menunjuk kembali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
- d. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraanam Megara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 1720/KPTA.W13-A/PS.1.7/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEDUA : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 19600212 198703 2 002

Tembusan Yth.:

1. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Plh. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; dan
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.



Lampiran I : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 1568/KPTA.W13-A/PS1.7/1/2025
Tanggal : 17 Juni 2024

**PENUNJUKAN TIMSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2	Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Pengarah
4	Dr. Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
5	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua Tim
6	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.	Perencana Pertama	Penyusun Laporan
8	Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.	Perencana Muda	
9	Ihdina Sabilal Haq, S.E.I.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Surveyor
10	Eka Siti Khomariyah, S.E.	Perencana Pertama	
11	Kartika Citraning Karwendyanto, S.Pd	Petugas PTSP	
12	Novera Intan Hapsari Suwarno Putri,. S.Sos.	Petugas PTSP	



Lampiran II : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 1568/KPTA.W13-A/PS1.7/1/2025
Tanggal : 17 Juni 2024

JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan jadwal survei; b. Menyiapkan materi <i>briefing</i> terhadap persiapan hingga pelaporan hasil survei.
4.	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei; b. Memimpin tahapan pelaksanaan survei mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian/ pelaporan hasil survei; c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei; d. Menentukan responden; e. Melaporkan hasil kegiatan survei kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Tim b. Menyiapkan dan mengirimkan surat terkait pelaksanaan survei; c. Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan survei.
6.	Penyusun Laporan	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;



NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
		Melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei.
7.	Surveyor	Menganalisis dan mengolah hasil survei.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 1283/WKPTA.W13-A/OT1.6/III/2025

Surabaya, 07 Maret 2025

Sifat : Penting

Hal : Permintaan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meminta kepada seluruh satuan kerja se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Triwulan I (periode Januari s.d. Maret) tahun 2025 pada aplikasi Survelag yang dapat diakses melalui alamat link <https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2025>;
2. Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdiri dari 5 (lima) orang responden yang pernah menggunakan layanan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud agar diisi secara lengkap paling lambat pada hari Rabu, tanggal **12 Maret 2025**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua,

Rusman Mallapi ✓

Publikasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2025

NILAI IPAK	RESPONDEN
3,95	Jumlah : 77orang Jenis Kelamin : L: 55/P: 22
NILAI INTERVAL KONVERSI	Pendidikan Strata-3 : 1 orang Strata-2 : 29 orang Diploma IV/Strata-1 : 43 orang Akademi/ Diploma : 2 orang SLTA/SMA/Sederajat : 2 orang
98,80	Periode Survei Januari s.d. Maret 2025

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2025

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR			
NO	RUANG LINGKUP/INDIKATOR	NILAI	MUTU PELAYANAN
1.	Diskriminasi Pelayanan	3,94	Bersih dari Korupsi
2.	Pelayanan di Luar Prosedur	3,96	Bersih dari Korupsi
3.	Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku	3,95	Bersih dari Korupsi
4.	Pungutan Liar	3,96	Bersih dari Korupsi
5.	Percaloan/ Perantara	3,95	Bersih dari Korupsi

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA